

**ANALISIS KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA VI  
SE-INDONESIA TENTANG PERMINTAAN DAN/ATAU PEMBERIAN  
IMBALAN ATAS PROSES PENCALONAN PEJABAT PUBLIK  
PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH***

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**ANDRI RATAMA**

**NPM: 1621020361**

**Progam Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2020 M**

**ANALISIS KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA VI  
SE-INDONESIA TENTANG PERMINTAAN DAN/ATAU PEMBERIAN  
IMBALAN ATAS PROSES PENCALONAN PEJABAT PUBLIK  
PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah



**Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M. H.**  
**Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, partai politik memiliki posisi dan peranan yang sangat strategis. Partai politik merupakan satu-satunya institusi yang berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat 2 UUD 1945. Hak konstitusional ini tidak dimiliki oleh lembaga demokrasi manapun selain partai politik. Sayang sekali, kedudukan yang strategis tersebut sering ternoda akibat praktek politik kotor yang mencederai mandate luhur yang diberikan, seperti praktek suap, politik transaksional, dan suatu *deal illegal* yang belakangan dikenal sebagai mahar politik. Akibat seringnya terjadi transaksi seperti itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa VI se-Indonesia mengeluarkan Fatwa tentang permintaan dan/atau pemberian imbalan atas proses pencalonan pejabat publik hukumnya adalah haram. Namun masih saja timbul sebuah pemikiran dan penilaian di tengah masyarakat bahwa kondisi seperti itu adalah suatu hal yang biasa, oleh sebab itu bagaimana hukum memberi dan menerima imbalan yang dikaitkan dengan kontestasi mendudukan jabatan publik dan komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata pemerintahan yang baik.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum permintaan dan/atau pemberian imbalan atas proses pencalonan pejabat publik menurut keputusan ijtima' ulama komisi fatwa VI se-Indonesia dan bagaimana perspektif *Maqashid al-Syariah* terhadap keputusan ijtima' ulama komisi fatwa VI se-Indonesia tentang permintaan dan/atau pemberian imbalan atas proses pencalonan pejabat publik. Tujuan dari penelitian ini adalah mampu menjelaskan bagaimana *Maqashid al-Syariah* memberikan penjelasan terhadap memberi dan menerima imbalan yang dikaitkan dengan komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata pemerintahan yang baik sehingga pejabat publik dalam rangka penunaian amanah akan terlaksana dengan baik sesuai tujuan Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang akan diteliti dan dibahas. Adapun cara yang ditempuh dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip serta menyusun data yang diperoleh sesuai pokok bahasan. Pengolahan data dilakukan melalui tahap editing dan sistimating. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa dalam Keputusan permintaan dan/atau pemberian imbalan atas proses pencalonan pejabat publik suatu permintaan dan/atau pemberian imbalan dalam bentuk apapun terhadap proses pencalonan seseorang sebagai pejabat publik hukumnya adalah haram, penerapan *Maqashid al-Syar'iah* dalam Keputusan fatwa MUI kaitannya dalam permintaan dan/atau pemberian imbalan atas proses pencalonan pejabat publik sangatlah penting untuk tercapainya sebuah mashlahat yang dimaksud lima unsur tujuan Allah Swt. inginkan pada makhluknya yaitu menjaga agama.



## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa VI Se-Indonesia  
Tentang Permintaan Dan/Atau Pemberian Imbalan Atas Proses  
Pencalonan Pejabat Publik Perspektif *Maqashid Al-Syariah*

Nama : Andri Ratama

NPM : 1621020361

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

## MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosyakan dan Dipertahankan Dalam Sidang  
Munaqosaah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin, M.H.

NIP. 196210221993031002

Marwin, S.H., M.H.

NIP. 197501292000031001

Ketua Jurusan,

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul "Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa VI Se-Indonesia Tentang Permintaan Dan/Atau Pemberian Imbalan Atas Proses Pencalonan Pejabat Publik Perspektif *Maqashid Al-Syariah*" di susun oleh Andri Ratama NPM. 1621020361 Program Studi: *Siyasah Syar'iyah*, telah diujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal : Selasa, 21 Juli 2020**

**Tim Dewan Penguji**

**Ketua : Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**

**Sekertaris : Rudi Santoso, M.Hi., M.H.**

**Penguji Utama : Dr. Jayusman, M.Ag**

**Penguji I : Dr. H. Khairuddin, M.H.**

**Penguji II : Marwin, S.H., M.H.**



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andri Ratama  
NPM : 1621020361  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa VI Se-Indonesia Tentang Permintaan Dan/Atau Pemberian Imbalan Atas Proses Pencalonan Pejabat Publik Perspektif *Maqashid al-Syariah*”. Adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam *foodnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar di maklumi.



Bandar Lampung, Mei 2020  
Penulis,

Andri Ratama  
Npm : 1621020361



## MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya.

(HR. Muslim)



## **PERSEMBAHAN**

Penulis Mempersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang tua ku tercinta, Bapak Suratman dan Ibunda Astuti yang tiada henti-hentinya mendoakan, selalu memberikan kasih sayangnya, yang selalu ada disetiap langkah hidupku, yang memberikan dukungan Moral maupun Materil dan yang selalu memberikan semua yang terbaik untukku.
2. Adikku tercinta Roy Dwiyanto yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan kuliah dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan.





## RIWAYAT HIDUP

Andri Ratama terlahir dari pasangan Bapak Suratman dan Astuti pada tanggal 15 September 1997 di Desa Taman Cari, Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Andri Ratama merupakan anak pertama dari 2 bersaudara mempunyai adik Roy Dwiyanto.

Pendidikan Andri Ratama bermula di SDN 1 Taman Fajar Lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Purbolinggo Lulus pada tahun 2013, Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Purbolinggo dan Lulus pada tahun 2016 kemudian melanjutkan pendidikannya di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah Jurusan *Siyasah Syari'iyah*.



Bandar Lampung, Mei 2020  
Yang membuat,

Andri Ratama  
1621020361

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penggendang diri dan seluruh ciptanya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.

Skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang sekaligus sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Marwin, S.H., M.H. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Dr. H. A Khumedi Jafar, S. Ag., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan juga sebagai ketua sidang yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



5. Frenki, S.E., M.Si. ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Hervin Yoky Pradikta, M.H.I. sekretaris Jurusan Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Khususnya program Studi (*Siyasah Syar'iyah*) Hukum Tata Negara atas Ilmu dan didikan yang telah diberikan.
8. UKMF-Gemais dan UKM Bapinda yang selalu ada dalam setiap perjuangan, selalu memberikan motivasi hidup sehingga mengarahkan diri senantiasa menjadi lebih baik. Selalu penulis ingat sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas H yang selalu memberi dorongan dan semangat juang yang tiada hentinya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain karena keterbatasan, kemampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki. Akhirnya harapan-harapan penulis, skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca atau penulis berikutnya untuk perkembangan Ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, Mei 2020  
Penulis,

Andri Ratama  
NPM. 1621020361

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penjelasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	12
E. Rumusan Masalah .....	12
F. Tujuan Penelitian .....	12
G. Signifikansi Penelitian .....	13
H. Metode Penelitian .....	13

### **BAB II KAJIN TEORI**

A. Kajian Teori .....	17
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Ijtima Ulama .....	17
2. Hakikat Politik Transaksional (Permintaan dan Pemberian Imbalan Pada Proses Pencalonan Pejabat Publik) .....	21
a. Proses Politik Permintaan dan Pemberian Imbalan Pada Proses Pencalonan Pejabat Publik .....	27
b. Bentuk-bentuk Permintaan dan Pemberian Imbalan Pada Proses Pencalonan Pejabat Publik .....	28
1) Permintaan dan Pemberian Imbalan Dalam Bentuk <i>Set Buying</i> .....	30
2) Permintaan dan pemberian Imbalan Dalam Bentuk <i>Influence Buying</i> .....	31
3) Permintaan dan Pemberian Imbalan Dalam bentuk Pembelian Penyelenggara Pemilu .....	32
3. <i>Maqashid al-Syari'ah</i> .....	33
a. Pengertian <i>Maqashid al-Syari'ah</i> .....	33
b. Konsep <i>Maqashid al-Syari'ah</i> Tentang Pemeliharaan dan Perlindungan Terhadap Lima Hal Pokok ( <i>al-Dharuriyat al-Kulliat al-Khams</i> ) .....	41
1. Memelihara atau Melindungi Agama	

(Hifz al-Din).....	42
2. Memelihara atau Melindungi Jiwa (Hifz al-Nafs).....	45
3. Memelihara atau Melindungi Akal (Hifz al-Aql).....	48
4. Memelihara atau Melindungi Keturunan (Hifz al-Nasb).....	51
5. Memelihara atau Melindungi Harta Benda (Hifz al-Mal).....	53
B. Tinjauan Pustaka.....	56
<b>BAB III PENYAJIAN DATA</b>	
A. Gambaran Umum.....	59
B. Dasar Hukum Penetapan.....	63
1. Al-Qur'an.....	64
2. Hadis-hadis Nabi.....	67
3. Kaidah <i>Sadd al-Dzari'ah</i> .....	69
4. Kaidah Fiqhiyah.....	70
5. Pendapat Ulama.....	71
C. Metode Istinbat Fatwa.....	72
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
A. Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan Atas Proses Pencalonan Pejabat Publik Menurut Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa VI se-Indonesia.....	78
B. Perspektif <i>Maqashid Al-Syariah</i> terhadap keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa VI Se-Indonesia Tentang Permintaan Dan/Atau Pemberian Imbalan Atas Proses Pencalonan Pejabat Publik.....	79
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	
A. Kesimpulan.....	85
B. Rekomendasi.....	85

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul yang dibahas skripsi ini adalah **“Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa VI Se-Indonesia Tentang Permintaan Dan/Atau Pemberian Imbalan Atas Proses Pencalonan Pejabat Publik Perspektif *Maqashid Al-Syariah*”**. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok, yaitu sebagai berikut :

1. Analisis menurut kamus Ilmiah Populer Kontemporer adalah sifat uraian, penguraian dan kupasan.<sup>1</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebab-musabab atau duduk perkara yang sebenarnya.<sup>2</sup>
2. Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa VI se-Indonesia tentang permintaan dan/atau pemberian imbalan atas proses pencalonan pejabat publik dapat diartikan sebagai segala bentuk putusan berdasarkan fatwa pemberian imbalan atas proses pencalonan pejabat publik, yang telah ditetapkan oleh Ijtima’ Ulama ke-6 Komisi Fatwa Majelis Ulama (MUI) di pondok pesantren Al-Falah Banjarbaru melalui empat komisi perwakilan 34 MUI dari seluruh indonesia.

---

<sup>1</sup> Alaex MA, *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer* (Surabaya: Karya Harapan, 2005), h.32

<sup>2</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kamus Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008), h.60

3. Perspektif *Maqashid al-Syari'ah* memiliki arti sebuah makna dan tujuan yang ingin dicapai atau dipelihara oleh syara' dalam seluruh atau sebagian besar hukumnya dalam hal ini adalah menurut pandangan *Maqashid al-Syari'ah*.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis keputusan yang dikeluarkan oleh Ijtima Ulama Komisi Fatwa ke-6 tentang permintaan dan/atau pemberian imbalan atas proses pencalonan pejabat publik dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*.

#### B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis dalam memilih judul **“Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa VI Se-Indonesia Tentang Permintaan Dan/Atau Pemberian Imbalan Atas Proses Pencalonan Pejabat Publik Perspektif Maqashid Al-Syariah”** adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif, kajian tentang bagaimana hukum memandang praktek politik permintaan dan atau pemberian imbalan atas proses pencalonan pejabat publik yang dikeluarkan oleh Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa ke-6 masih sangat perlu dibahas karena sesuai dengan fenomena yang terjadi, dirasa masyarakat masih menganggapnya sebagai bentuk perilaku yang biasa dilakukan, maka dari itu sulitlah mendudukan hukum yang sesuai dengan perilaku tersebut.

---

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

2. Secara subjektif, penelitian ini merupakan permasalahan yang masih berkaitan dengan jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dimana kajian atau permasalahan terkait Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa VI se-Indonesia Tentang Permintaan Dan/Atau Pemberian Imbalan Atas Proses Pencalonan Pejabat Publik merupakan kajian dalam bidang Siyasah (Hukum Tata Negara) yang ditinjau dari Perspektif *Maqashid al-Syariah*.

### C. Latar Belakang Masalah

Fikih sebagai salah satu produk pemikiran Mujtahid, tentunya tidak terlepas dari sifat pengetahuan atau keilmuan. Kebenarannya tidak bersifat absolute melainkan nisbi. Artinya, fikih dapat dikritik bahkan dapat diperbarui bila tidak selaras lagi dengan misi kemanusiaan. Wawasan etik sangat diperlukan supaya fikih menjadi selalu aktual dengan konteks Islam *rahmatan lil alamin*.

Salah satu kelemahan dasar dalam hal ini adalah karena Islam sebagai agama semata-mata hanya dipandang sebagai sebuah teks verbal dan bukan pada wawasan untuk menyatukan kembali antara fikih dan etika atau antara fikih dengan teologinya. Sebagai untuk memperbarui pemahaman Islam, kususnya fikih adalah dengan menghidupkan kembali wawasan tersebut. Oleh karena itu, agar fikih dapat memberikan jawaban yang selaras dengan cita-cita kemanusiaan, sangat perlu dibangun fikih yang berwawasan etis atau melandaskan fikih pada *Maqashid al-Syariah* (tujuan diterapkannya suatu hukum).

*Maqashid al-syariah* telah banyak dikenal luas dalam *ushul fiqh*. Namun pengembangan *maqashid*, dalam bentuk contoh konkret dan konteks kekinian masih sangat terbatas dan belum begitu luas. Misalnya dalam menanggapi masalah permintaan dan/atau pemberian imbalan atas proses pencalonan pejabat publik.

Permintaan dan pemberian imbalan atas proses pencalonan pejabat publik dapat diartikan sebagai upaya penggunaan uang atau barang yang diberikan sebagai bentuk pelunasan syarat dan sebuah pemberian hadiah yang dapat mempengaruhi suatu keputusan tertentu baik dalam suatu keputusan pemilihan ataupun dalam hal lain yang berhubungan dengan keputusan-keputusan penting. Dalam hal ini tentu saja dapat dipastikan keputusan yang di ambil tidak berdasarkan atas baik tidaknya keputusan tersebut bagi orang lain tetapi dari sejauh mana keuntungan yang dapat di peroleh dari keputusan tersebut.

Penguasa tertinggi pada sistem demokrasi adalah rakyat, sehingga rakyat dikenal dengan istilah *of the people, by the people, for the people*. Karena rakyat tidak mungkin menjadi pelaksana pemerintahan sendiri, maka dengan ini rakyat menunjuk beberapa orang yang dipercaya sebagai pelaksana harian yang dipilih langsung dari bawah mulai dari kepala desa sampai dengan yang tertinggi yaitu presiden.<sup>4</sup> Namun yang sering didapatkan dari pelaksanaan demokrasi ini adalah perilaku kecurangan politik, ketidak jujuran politik, kebohong-kebohongan dalam kampanye sampai

---

<sup>4</sup>Carlson, Matthew. "Money Politics in Japan: New Rules, Old Practices". Review by Axel Klein. *Pacific Affairs*, Vol.81, No.3 (Fall, 2008), pp. 470-471. Pacific Affairs, University Of British Columbia. <http://www.jstor.org/stable/40377748>. (Accessed: 30-06-2019).



dengan membodohi masyarakat dengan cara memberikan uang menjelang pencoblosan dengan upaya agar memilih partai atau pasangan tertentu.<sup>5</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, partai politik memiliki posisi dan peranan yang sangat strategis. Partai politik merupakan satu-satunya institusi yang berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat 2 UUD 1945.<sup>6</sup> Hak konstitusional ini tidak dimiliki oleh lembaga demokrasi manapun selain partai politik. Sayang sekali, kedudukan yang strategis tersebut sering ternoda akibat praktek politik kotor yang mencederai mandate luhur yang diberikan, seperti praktek suap, politik transaksional, dan suatu *deal illegal* yang belakangan dikenal sebagai mahar politik.

Secara normatif, UU melarang adanya permintaan dan/atau pemberian apapun dari terkait dengan proses pencalonan jabatan politik. Didalam pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 mengatur bahwa “Partai politik atau gabungan Partai politik tidak diperbolehkan menerima sebuah imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota”. Demikian sebaliknya, “Setiap orang atau lembaga dilarang memberi sebuah imbalan kepada Partai politik atau gabungan Partai politik dalam bentuk dan hal apapun dalam proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota”.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>L. Sumartini, *Money politics dalam Pemilu*, (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004), h.2.

<sup>6</sup>Undang-undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat 2 (Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2016), h.119.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 47 ayat (1)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 187 ayat (1) menjelaskan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai bentuk imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>8</sup>

Namun masih ada saja yang berani melakukam praktik seperti itu. Selama 2018 muncul pemberitaan atas keluhan dan testimoni beberapa calon yang menyatakan dimintai mahar politik ketika hendak mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Bahkan sudah ada yang menyettor namun akhirnya tidak dipilih. Faktanya, seseorang yang tidak memiliki modal financial yang cukup akan kesulitan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 187 ayat (1)

memperoleh dukungan partai politik. Tidak sedikit ditemukan, seseorang yang hendak melamar menjadi calon kepala daerah harus melakukan transaksi dan memberikan sejumlah uang sebagai permintaan agar mendapatkan dukungan partai politik. Demikian sebaliknya, tidak jarang partai politik mau mengusung calon tertentu dengan syarat memberikan imbalan.<sup>9</sup>

Akibat terlalu seringnya transaksi seperti ini, muncul permisifitas di tengah masyarakat dan muncul penilaian bahwa kondisi seperti ini adalah hal yang biasa. Kemudian disisi lain, muncul pertanyaan di kalangan masyarakat bagaimana hukum memberi dan menerima imbalan yang dikaitkan dengan kontestasi mendudukkan jabatan publik seperti kepala daerah dan juga Presiden yang dikaitkan dengan komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata pemerintahan yang baik.

Dalam konteks permintaan dan pemberian imbalan pada sistem politik sekarang ini sering kali di atasnamakan sebagai bentuk, bantuan, infak, sedekah, dan lain-lain. Dalam istilah moral keagamaan perilaku seperti ini secara tidak langsung memberikan perlindungan sosial melalui norma kultural masyarakat yang melazimkan tindakan seperti ini. Pada saat masyarakat telah menganggapnya sebagai yang lumrah, maka kekuatan legal formal hukum akan kesulitan untuk menjangkaunya. Karena itu butuh kecermatan untuk memahami setiap makna yang tersimpan dibalik perilaku politik sehingga dapat memudahkan dalam pemisahan

---

<sup>9</sup> Politik. *Majalah Tempo*, 14 oktober 2018, h. 12.

analisis antara pemberian yang sarat dengan nuansa suap dan pemberian yang sesungguhnya sebagai bantuan.<sup>10</sup>

Kesulitan mengambil persepsi yang tegas di kalangan pemimpin masyarakat cukup membingungkan masyarakat itu sendiri. Ketika agamawan menyatakan bahwa hal tersebut haram penilaian tetapi ada agamawan yang lainnya menyatakan tidak demikian (tidak menyatakan haram, namun tidak juga menyatakan boleh). Mantan Menteri Agama Malik Fajar misalnya seperti yang dikutip oleh Ismawan tidak secara tegas memberikan pemahaman bahwa hukum dari praktek politik seperti ini adalah haram, dikarenakan dia mengaku sulit mengatakan hukumnya dengan dalil-dalil yang jelas berkaitan langsung dengan hal ini. Akhirnya sulit dibedakan antara pemberian yang tergolong *rishwah* (suap) atau pemberian yang tergolong amal *jariyah*. Ketidakpastian hukum inilah yang menjadi salah satu penyebab maraknya praktik politik.<sup>11</sup>

Berbeda dengan Malik Fajar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam keputusan Ijtima' Ulama komisi Fatwa VI se-Indonesia tentang permintaan dan/atau pemberian imbalan atas proses pencalonan pejabat publik mengeluarkan fatwa mengenai politik uang dan pemberian imbalan untuk mengarahkan pilihan baik dalam pilkada maupun pemilu lainnya, hukumnya adalah haram. Suatu permintaan atau pemberian imbalan dalam bentuk apapun terhadap proses pencalonan seseorang

---

<sup>10</sup>Ahmad Khirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, (Semarang: Rasail, 2006),h.47

<sup>11</sup> Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi (Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syariah)*, (Jakarta: Pramedia Group, 2016), h.15



sebagai pejabat publik, padahal diketahui menjadi tugas, tanggung jawab, kekuasaan dan kewenangannya maka hukumnya adalah haram, karena tergolong kepada kategori *risywah* (suap) atau pembuka jalan *risywah*.<sup>12</sup>

Setiap peraturan yang dikeluarkan pastinya mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya. Tata aturan pada hukum positif memberikan pengajaran bahwa tujuan dibuatnya sebuah peraturan tidak lain adalah untuk ketentraman masyarakat, yaitu mengatur sebaik-baiknya, sangat menentukan batas-batas hak dan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat dalam hubungan satu sama lain. Tujuan-tujuan yang bernilai tinggi dan abadi tidak menjadi perhatian aturan-aturan pada hukum positif kecuali hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif.<sup>13</sup>

Islam sebagai gama samawi yang *shumul* (lengkap), berlaku abadi dan berlaku untuk seluruh umat manusia mempunyai sumber yang lengkap pula. Sumber ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis. Keduanya telah mengatur aspek hidup manusia. tidak ada aspek atau bidang kehidupan yang tidak diatur oleh Islam. Namun demikian, tentunya aturan-aturan Islam tersebut ada yang diberikan secara tegas dalam *nash-nash* kita suci Al-Qur'an maupun Hadis dan ada juga yang masih memerlukan penafsiran.

Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara khusus dan tegas istilah politik permintaan dan/atau pemberian imbalan atas proses pencalonan pejabat publik seperti ini. Beberapa ayat

---

<sup>12</sup> Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia tentang *Risywah* (Suap), *Ghulul* (Korupsi), dan Hadiah kepada Pejabat yang berlangsung pada tanggal 23 – 27 Rabi'ul Akhir 1421 H/25 – 29 Juli 2000 M.

<sup>13</sup> Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Palembang: Prena Media Group, 2018), h.79

Al-Qur'an oleh beberapa kalangan dinilai memiliki keterkaitan dengan politik seperti ini. Seperti Firman Allah SWT didalam QS. Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu juga membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"* (QS. Al-Baqarah: 188).

Dalam hukum Islam, bila terdapat hukum dari *nash-nash* maupun hadits yang belum bisa dipahami secara tegas maka manusia diwajibkan untuk melakukan penelaahan dan pengkajian ilmiah yang bersungguh-sungguh serta berkesinambungan dengan cara berijtihad (pengerahan seorang Faqih dengan kemampuannya dalam mengeluarkan hukum *syara'* dari dalil-dalil yang terperinci).<sup>14</sup> Hal inilah yang terjadi pada saat hukum terhadap permintaan dan/atau memberikan imbalan pada proses pencalonan pejabat publik tidak diatur secara tegas didalam Al-Qur'an dan Hadits sebagaimana yang telah disampaikan diatas.

Melihat kenyataan bahwa praktik politik yang telah begitu melekat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat bawah hingga atas, maka persoalan yang pelik ini harus diselesaikan dengan serius. Persoalan yang terkesan remeh, namun memiliki implikasi yang sangat negatif yang sangat besar bagi perkembangan

---

<sup>14</sup>Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syariah*, (Bandar Lampung: Kreasi Total Media, 2018),h.22

demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Permintaan dan memberikan imbalan pada proses pencalonan pejabat publik menjadi biasa. Akibatnya pemilu sulit menampilkan ciri kejujuran, keadilan, serta persaingan yang fair. Pemilu yang seperti ini akhirnya menciptakan pemerintahan yang tidak memikirkan nasib dan kesejahteraan rakyatnya. Namun demikian, masyarakat tetap bisa memberikan justifikasi hukum terhadap semua pemberian yang bersifat politik.

Ketetapan hukum atas pemberian politis ini harus melalui proses intresprestasi berupa memberikan pemahaman secara mendalam terhadap makna kepentingan yang sesungguhnya di balik perilaku politik dapat mengetahui alasan (*'illat*) yang mendasari suatu tindakan permintaan dan /atau pemberian imbalan pada proses pencalonan pejabat publik adalah haram ataukah halal seperti yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah *ushul fiqh* sebagai dasar pengambilan atau penetapan hukumnya.

Begitu banyaknya fenomena politik seperti ini di negara yang mayoritas Muslim ini selayaknya menjadi keprihatinan bersama, sehingga tidak berlebihan tentang sejauh mana spirit syariah berpengaruh secara signifikan terhadap berkehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu penulis membahas satu isu kontemporer terkait permintaan dan/atau pemberian imbalan atas proses pencalonan pejabat public dengan mengambil judul **“Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa VI Se-Indonesia Tentang Permintaan Dan/Atau Pemberian IMbalan Atas Proses Pencalonan Pejabat Publik Perspektif *Maqashid Al-Syariah*”**.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah lebih kepada persoalan terkait bagaimana Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa VI Se-Indonesia Tentang Permintaan Dan/Atau Pemberian Imbalan Atas Proses Pencalonan Pejabat Publik ditinjau dari sudut pandang tujuan diterapkannya hukum Islam (*Maqashid al-Syariah*).

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang disebutkan diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum permintaan dan/atau pemberian imbalan atas proses pencalonan pejabat publik menurut keputusan ijtima' ulama komisi fatwa VI se-Indonesia?
2. Bagaimana perspektif *Maqashid al-Syariah* terhadap keputusan ijtima' ulama komisi fatwa VI se-Indonesia tentang permintaan dan/atau pemberian imbalan atas proses pencalonan pejabat publik?



#### **F. Tujuan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hukum permintaan dan/atau pemberian imbalan atas proses pencalonan pejabat publik menurut keputusan ijtima' ulama komisi fatwa VI se-Indonesia.



- b. Untuk mengetahui perspektif *Maqashid al-Syariah* terhadap keputusan Ijtima' Ulama komisi fatwa VI se-Indonesia tentang permintaan dan/atau pemberian imbalan atas proses pencalonan pejabat publik.

## G. Signifikasi Penelitian

### 1. Secara Teoritis (Keilmuan)

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada pembaca mengenai *Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa VI Se-Indonesia Tentang Permintaan Dan/Atau Pemberian Imbalan Atas Proses Pencalonan Pejabat Publik Perspektif Maqashid Al-Syariah* Secara Praktis (bagi masyarakat)

### 2. Secara Praktis (bagi masyarakat)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah manfaat bagi semua kalangan masyarakat terkait Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa VI Se-Indonesia Tentang Permintaan Dan/Atau Pemberian Imbalan Atas Proses Pencalonan Pejabat Publik ini, dan juga terutama setiap orang yang ingin memperdalam Ilmu Hukum Tata Negara di Perguruan Tinggi pada Fakultas Hukum, maupun Fakultas Syari'ah.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

- a. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu suatu penelitian yang dilakukan

dengan membaca buku, literatur, dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>15</sup> Teori-teori yang penulis ambil dalam hal ini adalah dengan cara membaca dan mengambil dari buku yang berkaitan dengan masalah Politik kemudian menetapkan hukum dan menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut.

- b. Ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum *yuridis normatif*. Adapun bentuk penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti kembali bahan pustaka. Penelitian yang penulis tulis dilakukan atau diajukan hanya pada peraturan-peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.



## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah nash Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ilmu *Maqashid al-Syariah* Undang-undang Dasar 1945, Keputusan Ijtima'

---

<sup>15</sup>Ranny Kautur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi* (Bandung : Taruna Grafika 2000)

Ulama Komisi Fatwa VI Se-Indonesia Tentang Permintaan Dan/Atau Pemberian Imbalan Atas Proses Pencalonan Pejabat Publik.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bertujuan memberikan penjelasan mengenai bahan primer. Penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, skripsi, media masa, dan sebagainya.<sup>16</sup>
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bertujuan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dokumentasi adalah untuk mencari data mengenai hal-hal untuk variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis mencari data mengenai keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa VI se-Indonesia tentang permintaan dan/atau pemberian imbalan atas proses pencalonan pejabat publik, dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>17</sup>

### 4. Teknik Pengolahan Data

Secara umum pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia, UI-Press, 2007), h. 52.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129.

- a. Pemeriksaan data atau (*editing*) yaitu dengan cara memeriksa ulang kesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data atau (*coding*) adalah memberi catatan data yang menyatakan jenis data dan sumber data baik itu sumber Al-Quran dan as-Sunnah.
- c. Rekonstruksi data adalah menyusun ulang secara teratur dan berurutan logis, sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan, kemudian dapat ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dari proses penelitian.

#### 5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data berupa deskripsi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.<sup>18</sup> Dalam metode berfikir induktif dilakukan dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga mendapatkan jawaban yang benar dari permasalahan.

---

<sup>18</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika,2002), h. 77.



## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. Pengertian Ijtima Ulama

Islam adalah agama yang terbangun di atas dasar ilmu. Ia mendidik pemeluknya untuk tidak berkeyakinan maupun beramal dalam urusan agama, melainkan dengan ilmu yang dapat dipertanggung jawabkan, memiliki pondasi dan dasar yang sah, dan dapat dipastikan melalui jalur wahyu.

Ijtima' Ulama berasal dari suku kata ijtima atau ijtimak yang berasal dari bahasa Arab yaitu *اجتمع يجتمع اجتماعا* (*ijtima'a, yajtami'u, ijtmaa'an*) yang artinya adalah pertemuan atau perkumpulan, berhimpun, bersidang, bergabung, dan bersatu.<sup>19</sup> Sedangkan hasil dari Ijtima adalah ijma yang memiliki arti yaitu hasil dari keputusan yang diperoleh melalui ijtima.

Dalam istilah fiqh, ijtima bermakna persetujuan para ulama dalam masalah fiqh tertentu disuatu masa yang sama.<sup>20</sup> Contohnya didalam satu kesempatan terdapat 100 ulama bertemu untuk membahas sebuah permasalahan, kemudian mereka bersepakat dalam satu suara, dari semua yang dilakukan itulah yang dinamakan ijtima ulama. Sedangkan didalam istilah ilmu falak, ijtima memiliki sebuah makna konjungsi geometris, yaitu bertemunya bumi dan bulan

---

<sup>19</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus, 2007), h.54.

<sup>20</sup> A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1962), h.125-128.

di posisi bujur langit yang sama, ini jika dilihat dari bumi. Apabila sudah ijtima, itu tandanya telah masuk bukan baru dalam kalender Hijriyah.

Ijtima' berasal dari kata *ijma* yang mempunyai arti kesepakatan atau konsensus. Dalam dunia pesantren tradisional, ijtima ulama biasanya dikaitkan dengan keputusan dalam ranah fiqih (hukum Islam), bukan putusan yang berupa tentang politik praktis seperti penyebutan secara langsung nama orang yang mesti dipilih menjadi seorang pemimpin.

Istilah ijtima memiliki konotasi atas suatu pertemuan antara satu orang atau kelompok dengan lainnya dalam suatu tempat atau waktu tertentu. Ijtima didalam tradisi ilmu pengetahuan seringkali memiliki keterkaitan dengan ilmu sosial (*ijtima'iyah*) yang membicarakan soal tradisi adat kebiasaan, atau nilai-nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat.<sup>21</sup>

Pada cabang ilmu fiqih, *ijma* menempati level ketiga dari empat sumber hukum yang sah dan diakui setelah Al-Qur'an dan Hadits. Sumber hukum keempat adalah qiyas (presiden hukum). Dengan kata lain, ijtima bukan sesuatu hal yang dianggap main-main.

Menurut imam besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, seperti jika ada kegiatan bernama ijtima ulama maka legitimasi hasil ijtima itu sangat ditentukan oleh siapa saja ulama yang hadir. Jadi hasil dari pada ijtima ulama itu akan sangat bergantung pada siapa saja para ulama yang terlibat di ijtima tersebut.

---

<sup>21</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Wali, 2010), h. 145.

a. Dasar Hukum

1) QS. Al-Baqoroh: 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ  
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ  
يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ  
هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ

رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Artinya: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kalian (umat islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia, dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas kalian. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik kebelakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak tidak menyalahkan imanmu. Sungguh Allah maha pengasih lagi maha penyayang kepada manusia.” (QS. Al-Baqoroh: 143)

Saksi di atas bersifat umum mencakup kesaksian akan apa yang diperbuat manusia, dan kesaksian akan hukum perbuatan mereka. Di akhirat kelak umat islam bersaksi bahwa manusia telah melakukan perbuatan begini dan begitu, dan juga bersaksi bahwa perbuatan tersebut salah ataupun benar. Sedangkan saksi ucapannya mesti diterima.

2) QS. Al-Nisa: 115

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ  
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

Artinya: “Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa pada kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” (QS. Al-Nisa: 115).

Ayat di atas menjelaskan bahwa kesesatan ada di luar ajaran Rasul dan jalan orang-orang beriman. Maka jika ajaran Rasul (wahyu) atau kesepakatan kaum mukmin diikuti mestilah akan terhindar dari kesesatan.

### 3) QS. Al-Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa: 59).

Ayat di atas memerintahkan agar mengembalikan segala yang diperselisihkan kepada Alquran dan Assunnah. Jika tidak ada perselisihan maka tentu tak ada kelaziman untuk harus mencari-cari dalil teksnya.



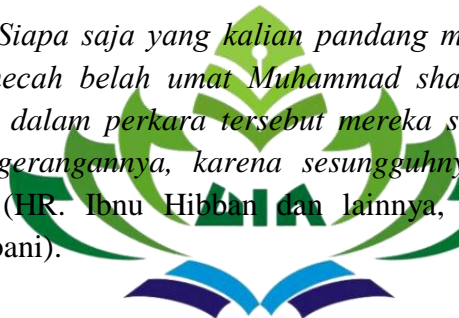
4) Sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ (رواه اترمذى و ابو داود)<sup>22</sup>

Artinya: “Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan.” (HR. Tirmidzi, derajatnya hasan menurut Syeikh Albani).

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَارِقَ الْجَمَاعَةِ أَوْ يَرِيدُ أَنْ يَفْرُقَ بَيْنَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمْرُهُمْ جَمِيعٌ، فَاقْتُلُوهُ كَاتِنًا مَنْ كَانَ، فَإِنْ يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ (رواه ابنو حبان)<sup>23</sup>

Artinya: “Siapa saja yang kalian pandang meninggalkan jama’ah atau ingin memecah belah umat Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, sedangkan dalam perkara tersebut mereka sepakat, maka bunuhlah ia siapapun gerangannya, karena sesungguhnya tangan Allah bersama jama’ah” (HR. Ibnu Hibban dan lainnya, derajatnya sahih menurut Syeikh Albani).



## 2. Hakikat Politik Transaksional (Permintaan Pemberian Imbalan Pada Proses Pencalonan Pejabat Publik)

Politik Transaksional terdiri dari dua kata, yakni politik dan transaksional.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, politik dipahami sebagai (pengetahuan) ilmu yang mempelajari tentang ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti, tentang sistem pemerintahan, dan dasar pemerintahan).<sup>24</sup> Dalam *Kamus Ilmiah Populer*

<sup>22</sup> At-Tirmidzi, Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi, tahqiq al-Albani*, (Riyad: Maktabah al-Ma’arif, 1997), Juz 1, h.345.

<sup>23</sup> Ala’udin Ali bin Balban Al-Farisi, *Shahih Ibnu Hibban*, (Yogyakarta: ICT Sarana Muslim Group, 2003), Jilid 4, h. 453.

<sup>24</sup> Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

*Kontemporer* kata politik memiliki arti yaitu ilmu kenegaraan atau tata negara dan sebagai kata kolektif yang menunjukkan pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan.<sup>25</sup> Politik juga dapat kita artikan sebagai segala tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Dari pengertian diatas, maka istilah politik dari segi bahasa menekankan pada kekuasaan, peraturan urusan publik, penerapan kebijakan, bentuk, dan sebuah sistem pemerintahan.

Harold D. Lasswell berpendapat bahwa politik adalah proses yang melibatkan oleh pejabat terpilih untuk menentukan “siapa mendapat apa, kapan, dimana, dan bagaimana”. Pemikiran seperti ini kemudian mempengaruhi arti politik sebagai sarana kekuasaan untuk distribusi sumber daya di pemerintahan. Dengan demikian, politik adalah proses menyelesaikan konflik sosial yang muncul saat menentukan siapa mendapat apa, kapan, dimana, dan bagaimana.<sup>26</sup>

Menurut etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang berarti kota dan berstatus negara kota (*city state*).<sup>27</sup> Dalam negara kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya.<sup>28</sup> Politik yang berkembang di Yunani pada waktu itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama.

---

<sup>25</sup> Alaex MA, *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer* (Surabaya: Karya Harapan, 2005), h.509.

<sup>26</sup> Harold D. Lasswell, *Who Get What, When, Why*, (US: Chicago Illionis, 1936), h. 35-38.

<sup>27</sup> Hidajat Imam, *Teori-Teori politik*, (Malang: Setara press, 2009). H.2.

<sup>28</sup> Basri Seta, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011),h.2.

Berbeda dengan pengertian diatas, kata politik dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *siyasah*. Didalam buku-buku para *ulama salaf al-shalih* dikenal dengan istilah *siyasah syari'ah*. Redaksi yang berbeda yang terdapat di dalam *wuzarat al-awqaf wa al-syu'un al islamiah* menyatakan bahwa *siyasah syari'ah* adalah upaya memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukan pada mereka jalan yang menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan waktu yang akan datang serta mengatur permasalahan mereka.<sup>29</sup>

Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa politik adalah kumpulan berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem negara (kekuasaan) yang menyangkut proses dalam menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

Kemudian untuk pengertian transaksional sendiri dalam urusan bisnis adalah adalah segala bentuk praktik tawar-menawar yang mengacu pada kepentingan jangka pendek.<sup>30</sup>

Politik transaksional berarti politik dagang, yaitu adanya orang yang menjual dan adanya orang yang membeli dan semuanya tentu membutuhkan alat pembayaran yang ditentukan bersama. Jika dalam jual-beli maka alat pembayaran yang biasanya dilakukan berupa uang tunai. Pada praktik politik,

---

<sup>29</sup>Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al Islamiah bi al Kuwait, *al-Mausu'at al-Fiqhiah*, (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyah, t.th), Vol. 25, h. 295

<sup>30</sup> Sudirman L, "Politik Transaksional Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, h.3.

jika terjadi politik transaksional, maka jelas akan ada yang memberi uang dan ada yang menerima uang dalam transaksi politik tersebut.<sup>31</sup>

Kekuasaan dalam politik transaksional adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi agar orang atau sekelompok orang bersikap atau berbuat sesuai dengan keinginan pihak pertama dengan cara apapun (*with whatever means*). Cara-cara yang bisa digunakan berupa bujukan (*persuasion*), paksaan (*coercion*) atau mengonstruksi insentif pada pihak kedua (*the construction of insentive*).

Hasil akhir dari sebuah negosiasi politik atau proses politik di bangku parlemen biasa juga disebut sebagai hasil dari *democratic bargain*. Semua pihak yang bersangkutan harus menerima kemenangan dan kekalahan politik secara wajar. Namun jika proses politik yang sudah terjadi memperoleh hasil akhir dari suatu proses yang tidak wajar, maka akan timbul istilah politik uang atau politik transaksional atau politik permintaan dan pemberian imbalan.

Telah disebutkan sebelumnya bahwasanya politik transaksional dan politik uang sangat erat hubungannya dengan politik permintaan dan pemberian imbalan pada proses pencalonan pejabat publik.

Permintaan dan pemberian imbalan atas proses pencalonan pejabat publik dapat diartikan sebagai upaya penggunaan uang atau barang yang diberikan sebagai bentuk pelunasan syarat dan sebuah pemeberian hadiah yang dapat mempengaruhi suatu keputusan tertentu baik dalam suatu keputusan pemilihan

---

<sup>31</sup>Muamar Riza Pahlevi, [http: //metrobari.com](http://metrobari.com), diakses tanggal 18 November 2019.



ataupun dalam hal lain yang berhubungan dengan keputusan-keputusan penting. Dalam hal ini tentu saja dapat dipastikan keputusan yang diambil tidak berdasarkan atas baik tidaknya keputusan tersebut bagi orang lain tetapi dari sejauh mana keuntungan yang dapat diperoleh dari keputusan tersebut.<sup>32</sup>

Pada sistem demokrasi, rakyat merupakan penguasa tertinggi yang biasa dikenal dengan istilah *of the people, by the people, for the people*. Karena rakyat itu tidak mungkin menjadi pelaksana pemerintahan sendiri, maka rakyat akan menunjuk beberapa orang yang dipercaya sebagai pelaksana harian yang dipilih langsung dari bawah mulai dari kepala desa sampai yang tertinggi yaitu presiden.<sup>33</sup> Namun yang seringkali kita dapatkan dari pelaksanaan demokrasi ini adalah sebuah perilaku kecurangan politik, ketidakjujuran politik, kebohongan-kebohongan dalam berkampanye hingga membodohi masyarakat dengan memberikan uang menjelang pencoblosan agar memilih partai atau pasangan tertentu.<sup>34</sup>

Memperhatikan beberapa pengertian atau definisi yang telah diberikan, maka dapat diberikan kesimpulan bahwa politik permintaan dan pemberian imbalan pada proses pencalonan pejabat publik adalah menggunakan penggunaan uang atau barang yang diberikan dengan jalan untuk mendapatkan

---

<sup>32</sup>L. Sumartini, *Money politics dalam Pemilu*, (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004), h.2.

<sup>33</sup>Carlson, Matthew. "*Money Politics in Japan: New Rules, Old Practices*". Review by Axel Klein. *Pacific Affairs*, Vol.81, No.3 (Fall, 2008), pp. 470-471. Pacific Affairs, University Of British Columbia. <http://www.jstor.org/stable/40377748>. (Accessed: 30-06-2019).

<sup>34</sup>L. Sumartini, *Money Politics Dalam Pemilu*, (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004), h.2.

posisi atau memperoleh dukungan dalam mencapai kekuasaan, baik berupa jabatan yang strategis di pemerintahan maupun kemenangan dalam suatu pemilihan umum.

Politik seperti permintaan dan pemberian imbalan dapat dilakukan oleh setiap orang yang memiliki kepentingan terkait dengan perbuatan tersebut. Setiap orang yang dimaksud adalah bisa orang yang sedang berperkara di pengadilan, kejaksaan maupun kepolisian, orang yang akan atau sedang mengikuti sebuah lelang atau tender di sebuah instansi pemerintahan, atau bisa juga orang yang sedang mengurus surat perizinan disuatu insatnsi pemerintah, orang yang mengikuti *fit propertest* untuk menduduki jabatan strategis tertentu di pemerintahan, bisa juga oleh calon atau pasangan calon yang sudah terdaftar dalam pemilu kepala daerah (Pilkada), bisa juga calon legislator yang sudah terdaftar sebagai calon dalam pemilu legislatif (Pileg), calon dalam pasangan Capres/Cawapres yang terdaftar dalam pemilu presiden (Pilpres), calon senator yang terdaftar dalam calon anggota DPD dalam Pemilu DPD, calon kepala desa yang terdaftar dalam Pemilu kepala desa (Pilkades) dan seterusnya. Semua pelaku-pelaku ini merupakan pelaku utama dalam politik permintaan dan pemberian imbalan pada proses pencalonan pejabat publik.

Politik permintaan atau pemberian imbalan menjelaskan hubungan pertemanan atau persaudaraan dalam setiap pendekatan untuk memenuhi permintaan atau keinginan. Faktor persahabatan adalah penting dan jadi

keutamaan. Pada kondisi tertentu pendekatan transaksional meletakkan peran individu lebih dominan, dan tidak terikat kepada peraturan atau sistem.

Persaingan dalam hubungan transaksional hanya bisa berjalan apabila semua peraturan yang telah ditentukan, dipahami dan dipersetujui. Hubungan transaksional terdapat dimiliki oleh individu yang akan mencari kesempatan, menipu, memaksimumkan keuntungan dan mencari jalan pintas untuk bisa menang.

Politik seperti permintaan atau pemberian imbalan yang terjadi atas proses pencalonan pejabat publik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan modern masyarakat sekarang ini.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa politik permintaan atau pemberian imbalan merupakan suatu bentuk transaksi atau perjanjian antara dua pihak yang saling mempunyai kebutuhan terutama pada praktik politik terdapat sebuah proses dimana ada yang memberi dan ada yang menerima sesuatu baik berupa materi maupun non materi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

#### a. Proses Politik Permintaan dan Pemberian Imbalan Pada Proses Pencalonan Publik

Menurut kamus politik kapitalisme, politik dipandang sebagai sebuah seni atau jalan untuk mendapat kekuasaan dengan modal besar walaupun kadang minus dengan gagasan. Konsekuensi paham politik demikian, maka berbagai cara akan digunakan untuk mendapatkannya. Salah satu cara dalam

hal ini adalah dengan praktik permintaan dan pemberian imbalan. Politik permintaan dan pemberian imbalan dapat berupa perjanjian politik antar beberapa pihak dalam usaha menerima serta memperlal kekuasaan.

Politik permintaan dan pemberian imbalan biasa dilakukan oleh tim pemenangan calon kepala daerah kepada masyarakat dengan cara-cara strategi yang dirancang untuk mengangkat sebuah perolehan suara calon kepala daerah. Proses transaksi yang terjadi antara yang menjual dan memberi tentunya dibutuhkan alat pembayaran jual-beli tersebut, seperti berupa uang ataupun lainnya sehingga dapat mempengaruhi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada yang berlangsung.

b. Bentuk-bentuk Politik Permintaan dan Pemberian Imbalan Pada Proses Pencalonan Pejabat Publik.

Politik Permintaan dan/atau Pemberian imbalan yang marak terjadi akhir-akhir ini didalam proses Pilkada/Pileg/Pilpres merupakan bentuk dari politik uang. Demokratisasi yang saat ini sedang berkembang di Indonesia menjadi alasan terjadi kasus tersebut apalagi berkenaan dengan adanya Pilkada/Pileg/Pilpres yang penyelenggaraannya dilakukan secara langsung oleh rakyat telah mendorong pihak-pihak tertentu untuk mengambil jalan pintas merebut suara rakyat yaitu dengan jalan politik permintaan atau pemberian imbalan. Politik permintaan atau pemberian imbalan, bagi partai politik dan calon anggota legislatif masih ditempatkan sebagai sumber daya

sekaligus cara yang paling mutakhir dilakukan dalam rangka untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam setiap proses Pemilu.

*Indonesian Corruption Watch* memperlihatkan bahwa ada beragam cara atau alasan untuk melakukan sebuah politik uang setelah dilaksanakannya ketentuan mengenai Pilkada langsung sejak tahun 2005. Secara langsung Politik seperti ini bisa berbentuk dalam hal pembayaran tunai dari tim sukses atau calon tertentu kepada konstituen yang potensial, sumbangan dari kepala Balon atau kepada parpol yang telah mendukungnya, atau sebuah sumbangan wajib yang disyaratkan oleh parpol kepada para kader partai atau Balon tersebut yang ingin mencalonkan diri sebagai seorang Bupati atau Wali Kota. Politik uang juga biasanya dapat berbentuk sebagai pembagian hadiah atau *door prize*, pembagian sembako kepada konstituent, pembagian semen di daerah pemilihan dan masih banyak yang lainnya.

Dalam banyak kasus yang terjadi akhir-akhir ini masih diwarnai dengan praktik-praktik kotor *money politics* pada proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung untuk membiayai tim sukses kepada calon masing-masing dengan memanfaatkan akses-akses sebuah pengambilan keputusan di daerah tersebut dan melakukan manipulasi pengalokasian anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sering kali banyak kita saksikan pos anggaran yang seharusnya dilokasikan untuk membangun infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, seketika berubah



dan digantikan dengan praktik *insider trading*. Sebagai upayanya modus yang biasanya dilakukan adalah berdasarkan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif didalam rapat yang dilakuakn bersama dengan mereka.

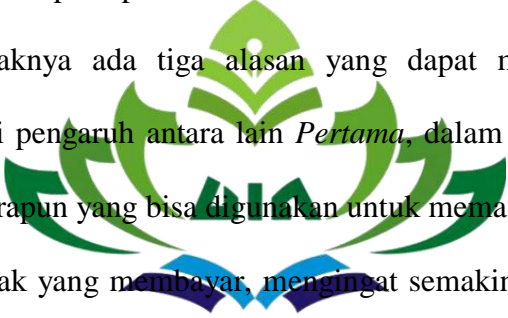
Pada prinsipnya, bentuk sebuah politik permintaan dan pemberian imbalan dalam Pemilu/Pilkada ini terdiri dari beberapa bentuk seperti *Set Buying* (beli kursi), *influence buying* (beli pengaruh), dan pembelian penyelenggara pemilu.

#### 1) Permintaan dan Pemberian Imbalan dalam Bentuk *Set Buying*

Dalam kasus yang pertama biasa dikenal dengan istilah beli kursi (*set buying*). Kandidat yang ingin menjadi seorang pejabat publik, seperti anggota DPR/DPRD, Presiden ataupun kepala daerah melakukan upaya dengan kekuatan uang ataupun dengan koneksinya dapat memesan jatah kursi nomor pertama. Praktek ilegal seperti ini akan tumbuh subur apabila penentuan kandidat para pejabat publik hanya diperbolehkan untuk partai politik saja, tanpa memberikan sedikitpun peluang bagi calon pejabat publik lewat kandidat Independen untuk turut serta sebagai rival dalam kompetisi politik. Apalagi jika mekanisme Pemilu yang terjadi antara internal Partai, semisal konvensi, maka juga tidak akan membuka kesempatan bagi masyarakat (konstituen) untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pada saat menentukan calon yang akan mewakili partai.

## 2) Permintaan dan Pemberian Imbalan dalam Bentuk *Influence Buying*

Bentuk kedua dari politik uang dalam Pemilu/Pilkada adalah praktik beli pengaruh (*influence buying*), yakni sebuah perbuatan illegal yang dilakukan oleh seorang kandidat atau partai politik dengan cara membeli tokoh masyarakat seperti tokoh Agama dan pemuka Adat untuk mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan politik mereka. Ketika Pemilu dilakukan secara langsung, sebagaimana dalam pemilihan kepala daerah nanti, maka praktik pembelian pengaruh akan lebih efektif digunakan dari pada pendekatan beli suara.



Setidaknya ada tiga alasan yang dapat menjelaskan terjadinya praktik beli pengaruh antara lain *Pertama*, dalam Pemilu langsung tidak ada satu carapun yang bisa digunakan untuk memastikan loyalitas pemilih kepada pihak yang membayar, mengingat semakin akan dijaminnya asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. *Kedua*, ongkos atau biaya yang digunakan untuk membeli sebuah suara dengan model pemilihan langsung jauh lebih besar dibandingkan dengan membeli suara dalam sistem pemilu yang menggunakan perwakilan. Karena itu, akan lebih murah jika para tokoh masyarakat berpengaruh yang dibeli. *Ketiga*, secara kultural, ikatan primordial yang terjadi antara masyarakat dan tokohnya, baik seorang pemuka agama, pemuka adat, ataupun tokoh informasi lainnya, hingga saat ini masih memiliki hubungan yang sangat

kental sehingga pengaruh mereka bisa dilakukan untuk memobilisasi suara.

### 3) Permintaan dan Pemberian Imbalan dalam Bentuk Pembelian Penyelenggara Pemilu

Bentuk lainnya dalam politik permintaan dan pemberian imbalan adalah proses praktik pembelian penyelenggara Pemilu, yaitu sebuah tindakan illegal oleh kandidat atau partai politik dalam memengaruhi proses Pemilu dengan cara menyuap para penyelenggara Pemilu, mulai dari tingkat desa, kelurahan, dan seterusnya, serta pengawas pemilu untuk bisa melakukan sebuah praktik-praktik curang, seperti menggandakan jumlah pemilih, memasukkan surat suara illegal, membatalkan sebuah surat suara yang sah, dan mampu melakukan manipulasi dari jumlah perhitungan suara.

Dalam penyelenggaraan sebuah pemilu, perbuatan seperti ini dapat mempengaruhi ke-independensian dari penyelenggara Pemilu itu sendiri, kemudian dapat juga mempengaruhi sebuah aspirasi pemilih yang semestinya dicerminkan dari pilihan politik mereka. Penyimpangan yang sangat perlu diwaspadai dalam sebuah Pemilu adalah kandidat yang berposisi sebagai *incumbent politician*, yakni kandidat yang pada saat sekarang masih menempati jabatan sebagai pejabat publik, kedudukan mereka pada saat penyelenggaraan pemilu dinilai sangat menguntungkan karena memiliki akses besar terhadap sumber keuangan daerah (APBD)

sekalius kewenangan untuk mengalokasikan anggaran itu untuk kepentingan kemenangan Pilkada.

Program-program populis yang datang ke desa-desa atau kampung-kampung, seperti halnya pembuatan atau perbaikan jalan, pembangunan saluran irigasi, pembangunan tempat ibadah, pembagian bahan kebutuhan pokok, dan pemberian benih atau bibit gratis kepada petani, yang dilakukan secara tiba-tiba menjelang proses Pilkada sangat perlu kita curigai sebagai salah satu bentuk penggunaan dana publik untuk kepentingan kemenangan Pilkada. Selain itu juga *incumbent politicians* memiliki kesempatan dan kekuasaan yang sangat besar untuk mempengaruhi independensi panitia penyelenggara Pilkada.

### 3. Pengertian *Maqashid al-Syariah* tentang Perlindungan Terhadap Lima Hal Pokok

#### a. Pengertian *Maqashid al-Syariah*

Setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap insan yang berakal sehat pasti memiliki maksud atau tujuan. Apalagi Allah *subhanahu wata'ala*, Sang Maha Pencipta dan Maha Berkehendak, pastilah segala tindakan-Nya dilandasi oleh maksud dan tujuan. Allah menetapkan syariat yang paling agung untuk umat manusia, pasti memiliki maksud dan tujuan.

Secara etimologi, *Maqashid al-Syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* sendiri berarti kesengajaan atau tujuan. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshud* yang berasal dari

suku kata *qashada* yang memiliki arti menghendaki atau memaksudkan. *Maqashid* dapat diartikan sebagai hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.<sup>35</sup> Adapun kata *syari'ah* secara bahasa berarti (تَحْدَرُ الْمَوَاضِ إِلَى), artinya jalan menuju mata air atau dapat juga diartikan sebagai jalan menuju kehidupan.<sup>36</sup> Allah SWT menyebutkan beberapa kata “*syari'ah*” di antaranya di dalam Qs. *al-Jatsiyah*, (42):18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Atinya: “kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”

Adapun secara terminologi, *Maqashid al-Syari'ah* adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Dapat di pahami *Maqashid al-Syari'ah* adalah sejumlah makna atau tujuan yang hendak dicapai oleh *syara'* dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya, atau ia adalah tujuan dari *syari'ah*, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh syar'i yaitu (pemegang otoritas *syari'ah*, Allah dan Rasul-Nya).<sup>37</sup>

<sup>35</sup>Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, (Qahiro:Darul Ma'arif,t.th),Jilid I,3642

<sup>36</sup>Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir:Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), h.712.

<sup>37</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islam*,(Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), Juz II, 1045.

Menurut Satria Efendi, *maqashid al-syari'ah* mengandung dua yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum sendiri mengacu kepada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan untuk pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum sendiri identic dengan pengertian istilah *maqashid al-syari'* (tujuan Allah menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits kaitannya dengan hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.<sup>38</sup>

Sementara itu Wahab al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' yang terdapat pada setiap hukumnya.<sup>39</sup>

Teori *maqashid al-syari'ah* sering diartibusikan pada sosok *Abu Ishaq al-Syatibi* didalam kajian ushulnya kitab *al-Muwafaqat* dengan pendekatan *Maqashid* menjadikan dirinya sebagai sosok dirinya dikenal sebagai bapak *Maqashid*. Kajian tentang *Maqashid al-Syari'ah* pada hakekatnya telah dimulai sejak lama, ulama Tabi'in telah memulai membahas

---

<sup>38</sup> Ghofar Shidiq, "Teori *Maqashid Al-Syari'ah* Dalam Hukum Islam". *Sultan Agung*, Vol XLiv No.(120 118 Juni – Agustus 2009), h. 3.

<sup>39</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.



kajian mengenai *Maqashid al-Syari'ah*, diantaranya adalah *Ibrahim al-Nakhai* seorang murid dari *AL-Qamah ibnu Qais al-Nakhai* sebagai murid langsung dari *Ibnu Mas'ud r.a.* diriwayatkan bahwa ia berpandangan Hukum Islam adalah hukum yang logis, memiliki acuan-acuan berupa latar belakang ('*illah hukum*') berupa substansi dan tujuan hukum (*Maqashid al-Syari'ah*) berupa kemaslahatan umat.<sup>40</sup>

Syari'at pada dasarnya itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat luas, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.

Hukum Islam adalah aturan yang mengakui kehormatan manusia, dan disisi yang lain mengarahkannya kepada perwujudan kemaslahatan masyarakat. Penerapan hukum Islam terhadap situasi yang beraneka ragam, baik dalam arti masa maupun dalam arti tempat, membutuhkan hukum yang fleksibel.<sup>41</sup> Hal ini tampaknya tidak hanya disadari oleh para ulama modernis, tetapi juga oleh ulama masa lalu. Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala sesuatu yang bermanfaat dan mencegah yang mudarat yaitu yang tidak

---

<sup>40</sup> Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam (Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan)*, (Bandar Lampung: Total Media, 2015), h. 29.

<sup>41</sup> A. Jazuli, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 256.

berguna bagi kehidupan. Dengan kata lain, penerapan hukum adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.

Syariat Islam yang bersumber pada Al-Qur'an sebagai sumber utama adalah pedoman bagi seluruh manusia. Sebagai pedoman hidup, syariat Islam memiliki tujuan utama yakni untuk kemaslahatan umat manusia. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT tidak ditetapkan kecuali untuk kemaslahatan umat, yaitu menarik kemanfaatan, mencegah kerusakan, dan membersihkan dunia dari kejahatan dan kemungkaran. Pengetahuan mengenai berbagai tujuan ketetapan hukum Allah tersebut dalam ruang lingkup kajian *ushul fiqh* disebut dengan *maqashid al-syariah* yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam.

Pengetahuan tentang *maqashid al-syariah* ini akan dapat membantu memahami teks-teks keagamaan (*al-Nushush al-Syariah*) dan mengaplikasikannya dalam realitas kehidupan. *Maqashid al-Syari'ah* bisa digunakan sebagai konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syarak yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadis), yang ditetapkan oleh Allah terhadap manusia. Adapun tujuan akhir dari hukum tersebut adalah satu, yaitu mewujudkan maslahah atau kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia.

Secara umum tujuan syariat Islam dalam menentukan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia seluruhnya,

baik kemaslahatan di dunia atau kemaslahatan di akhirat dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain hukum Islam tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.<sup>42</sup> Kemaslahatan itu semua tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Agar hukum Islam dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari *ushul fiqh* yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.

Dalam rangka pemahaman dan dinamika hukum Islam, berdasarkan pemikiran *al-Shathibi* dalam kitab *al-Muwafaqat*, bertolak dari batasan bahwa *al-Maqashid* adalah kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwa *al-Shathibi* juga membagi *maqashid* atau tujuan hukum itu kepada dua orientasi kandungan. Kedua kandungan tersebut yaitu *al-Masholih al-Dunyawiah* atau (tujuan kemaslahatan dunia) dan *al-Masholih al-Ukhrawiah* (tujuan kemaslahatan akhirat).<sup>43</sup> Kedua aspek ini menurut *al-Shathibi* tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam.

---

<sup>42</sup>Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam (Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan)*, (Bandar Lampung: Total Media, 2015), h. 28.

<sup>43</sup> Asafri Jaya Bakri, *Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Shathibi*, (Jakarta: Pt raja Grafindo Persada, 1996), h. 73.

Maslahat sebagai substansi dari *maqashid al-syari'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan :

1. *Dharuriyat*, yaitu suatu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi. Maka dengan ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Di dalam Islam, *maslahat dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: *pertama*, realisasi dan perwujudannya, dan *kedua*, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.
2. *Hajiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang sangat diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan

terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.<sup>44</sup>

3. *Tahsiniyat*, yaitu masalah yang merupakan bagian dari tuntutan *murū'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. *Maslahat tahsiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.<sup>45</sup>

Uraian tersebut membentuk pemahaman bahwa dapat dipahami kebutuhan manusia kepada *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*, bersifat gradual dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat terendah. *Dharuriyat* merupakan kebutuhan tertinggi manusia, kemudian disusul dengan kebutuhan *hajiyyat*, dan diakhiri dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Hal ini berarti bahwa hukum-hukum syarak yang dimaksudkan untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan *dharuriyat*, adalah hukum yang paling penting dan paling berhak mendapatkan perhatian. Dengan demikian bahwa hukum-hukum yang disyariatkan untuk kebutuhan manusia dan bersifat *tahsiniyat* menduduki kegunaan sebagai penyempurna (*mukammilah*) bagi hukum-hukum yang disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat *hajiyyat*. Begitu pula hukum-hukum yang disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat

---

<sup>44</sup> Tafsir Al-Qur'an Tematik, *Maqashidusy Syari'ah; Memahami Tujuan Utama Syari'ah*, (Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Ri, 2013), h. 20.

<sup>45</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 1020-1023

*hajiyyat* berkedudukan sebagai penyempurna bagi hukum-hukum yang disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat *dharuriyat*.<sup>46</sup>

Berdasarkan apa yang telah disampaikan bahwasanya yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan yang bersifat *dharuriyat*. Al-Shathibi menjelaskan tentang *al-dharuriat al-kulliat al-khams* (lima kebutuhan al-dharuriyat), yakni *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-aql* (memelihara akal), *hifzh al-nasb* (memelihara keturunan), dan *hifzh al-mal* (memeliharaharta). Kelima tujuan hukum Islam tersebut dalam kajian kepastakandisebut *al-maqashid al-khamsah* atau *maqāshid al-syariah*. Imam Shi-hab al-Din Al-Qarafi telah menambahkan satu tujuan dasar lagi, yaitu memelihara *hifzh al-arid* (kehormatan diri).

b. Konsep *Maqashid al-Syari'ah* Tentang Pemeliharaan dan Perlindungan Terhadap Lima Hal Pokok (*al-Dharuriat al-Kulliat al-Khams*)

*Maqashid al-Syari'ah* yang berintikan *al-Dharuriat al-Kulliat al-Khams* akan menghatarkan orang pada kesimpulan bahwa *al-Dharuriat al-Kulliat al-Khams* adalah konsep yang universal. Ia mengandung nilai-nilai yang di akui kebenarannya secara universal tanpa membedakan suku, bangsa, Agama, dan atribut atribut primordial lainnya. Kebutuhan manusia yang bersifat *dharuriyat* merupakan tuntutan yang yang tidak bisa di tawar-tawar

---

<sup>46</sup> Tafsir Al-Qur'an Tematik, *Maqashidusy Syari'ah; Memahami Tujuan Utama Syari'ah*, (Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Ri, 2013), h. 21.



lagi. Seperti yang telah disinggung diatas kemaslahatan yang bersifat *dharuriat* ini terdiri dari 5 (lima) hal yakni:

1. Memelihara atau Melindungi Agama (*Hifzh al-Din*)

Agama dalam pandangan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan agama dapat dikatakan sebagai esensi dari keberadaan manusia. Manusia tanpa agama seperti berjalan dimalam hari tanpa pelita. Seorang filosof pernah berkata banyak komunitas dapat hidup tanpa ilmu, seni, dan filsafat tetapi tidak pernah ditemukan sebuah kelompok manusia yang hidup tanpa agama.

Secara logika, agama menjawab pertanyaan yang muncul dalam diri manusia, sejak manusia ada hingga saat ini, tentang dari mana, kemana, mengapa, dan mengapa ia ada. Agama menyelamatkan manusia dari kebingungan dan keraguan atas wujudnya, siapa yang mewujudkan, mengapa diwujudkan, mengapa ada kehidupan dan kematian dan kemana manusia setelah mati. Secara kejiwaan agama adalah panggilan fitrah naluriah mengakui keberadaan Zat yang Maha agung, tempat seseorang menghamba, takut, tunduk, dan cinta. Secara moral, agama juga menjadi kebutuhan manusia, karena memberikan dorongan pada kebaikan untuk mendapat keridaan tuhan dan pada saat yang sama menjadi penangkal dari perbuatan buruk. Dengan agama manusia juga dapat menjalin

hubungan sosial yang erat antara satu dengan yang lainnya, bahkan sampai lintas bahasa, warna kulit, wilayah dan sebagainya.<sup>47</sup>

Memelihara agama adalah suatu hal yang paling utama dalam hukum Islam dikarenakan agama merupakan pedoman hidup dan dalam Agama Islam selain komponen-komponen kaidah yang merupakan sikap berhubungan baik seorang Muslim baik berhubungan dengan Tuhannya, maupun berhubungan baik dengan manusia lain dan benda didalam masyarakat. Karena itulah hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.

Selain itu, Islam juga menjaga hak dan kebebasan. Dalam Islam kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, yang demikian tidak boleh dipaksakan untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh berpindah keyakinannya untuk masuk Islam.

Ada tiga pokok penting yang berkaitan dengan pemeliharaan agama ini, *pertama*, bahwa agama merupakan fitrah, maka manusia mesti beragama baik agamanya itu benar atau salah, jika ia keluar dari fitrahnya itu, maka akan terjadi keganjilan dan penyimpangan, tetapi yang

---

<sup>47</sup> Tafsir Al-Qur'an Tematik, *Maqashidusy Syari'ah; Memahami Tujuan Utama Syari'ah*, (Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Ri, 2013), h. 31.

dimaksud agama disini adalah agama yang benar. *Kedua*, menyangkut media pemeliharaan agama. Memelihara agama merupakan *maqashid* yang paling penting dan tidak mungkin maksud yang agung ini tersia-siakan, putar balik dan berubah, karena jika ia demikian, maka tersia-siakan pula maksud yang lain. Hal ini sama dengan ibarat masyarakat yang tidak memiliki pemimpin.<sup>48</sup>

Pemeliharaan agama dalam penerapannya terhadap *dharuriyyat* dapat dicontohkan dalam beberapa kasus berikut ini: diperintahkannya manusia oleh Allah SWT untuk mengerjakan shalat dan menunaikan zakat dan berbagai perintah agama lainnya yang bertujuan untuk kemaslahatan. Begitu juga sebaliknya yang berkaitan dengan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kefiadaannya, seperti perintah melakukan jihad, dan penetapan hukuman bagi orang murtad, karena hal ini akan dapat mendatangkan kemafsadatan terhadap eksistensi agama. (*dar'ul mafasid*).

Mengingat pentingnya keberadaan agama dalam kehidupan manusia, Islam memberikan perlindungan kepada agama sebagai salah satu bentuk perlindungan Islam terhadap berbagai kebutuhan mendasar manusia lainnya, seperti jiwa, akal, keturunan dan harta. Perlindungan itu


---

<sup>48</sup> Ismardi Ilyas, "Stratafikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya". *Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 Juni 2014, h.18.

dalam bentuk penanaman nilai-nilai ajarannya kedalam hati para pemeluknya dan pengembangannya serta menjaga keberlasungannya.

## 2. Memelihara atau Melindungi Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Syari'at Islam sangat mementingkan memelihara jiwa, maka diantara hukum menetapkan itu sebagai kemaslahatan yang penting dan menolak hal yang mafsadat, sebab jika nyawa tersia-siakan lenyaplah sang mukallaf, dan pada gilirannya lenyaplah akan membawa kepada hilangnya agama. Yang dimaksud dengan jiwa disini adalah jiwa yang terpelihara, adapun jiwa yang lain seperti nyawa orang yang diperangi, maka ia bukanlah jiwa yang dipelihara oleh syari'at, karena ia adalah musuh dari Islam.



Menurut mayoritas ulama, dipimpin oleh Imam al-Gazaliy, *hifzun-nafs* menempati urutan kedua setelah *hifzud-din*. Ibnu Taimiyyah mendukung pendapat ini dengan menyampaikan, "Kerusakan adakalanya dalam urusan agama dan adakalanya dalam urusan dunia. Maka kerusakan terbesar dalam urusan dunia adalah membunuh jiwa-jiwa tanpa hak. Karena itu, pembunuhan adalah dosa terbesar di antara dosa-dosa besar lainnya setelah kerusakan terbesar dalam urusan agama, yaitu kekufuran.

*Nafs* di sini menurut sebagian pendapat adalah roh atau nyawa, lebih spesifik lagi ia adalah nyawa yang *ma'sum*, yakni nyawa yang memiliki hak untuk dijaga. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Khalil,

salah satu makna *nafs* adalah roh/nyawa yang dengannya jasad menjadi hidup. Pendapat ini misalnya disampaikan oleh Harun Abdur-Rahman Syekh dan merupakan sikap resmi *Hai'ah Kibar al-Ulama'* di Saudi dalam sebuah "*bayan*" (sikap resmi) yang diterbitkan di Majallah *al-Buhus al-Islamiyyah*. Akan tetapi, tampaknya pendapat ini kurang tepat, karena arti *nafs* jauh lebih luas. Keharusan menjadi *nafs* tidak saja dengan mempertahankan nyawa, tetapi juga menjaga kehormatan diri manusia. Pendapat demikian misalnya disampaikan oleh Ben Zagibah 'Izzuddin yang mendefinisikan *hifzun-nafs* dengan: "menjaga diri (zat) manusia pada unsur-unsur materi dan moralnya, dengan tujuan untuk menegakkan intisari manusia yang merupakan poros bagi keberlangsungan pembangunan bumi, dan agar manusia sebagai khalifah Allah menjadi nyata."<sup>49</sup> Hal yang sama disampaikan oleh Dr. Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimi yang menyatakan bahwa *hifzun-nafs* adalah menjaga hak diri untuk hidup, selamat, ter- yang dimaksud dengan hormat, dan mulia, sesuai dengan firman Allah: QS. *Al-Isra* :17

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ

خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾

<sup>49</sup> Tafsir Al-Qur'an Tematik, *Maqashidusy Syari'ah; Memahami Tujuan Utama Syari'ah*, (Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Ri, 2013), h. 55.

Artinya: *“Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah Kami binasakan. dan cukuplah Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha melihat dosa hamba-hamba-Nya.”*

Memelihara atau melindungi jiwa adalah tujuan yang kedua hukum Islam. Untuk tujuan ini, Islam melarang penghilangan jiwa (pembunuhan) dan terhadap pelaku penghilangan jiwa (pembunuhan) diancam dengan hukuman qishas (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetapi hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera. Pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 H, Nabi SAW menuju ke Padang Arafah, di sana ia berkhutbah, yang intinya bahwa Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkuat hak-hak. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup. Maka, tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan atau kehancuran.



Para ulama sepakat mengatakan bahwa tujuan syari'at diturunkan Allah untuk memelihara jiwa manusia. Mereka memberikan contoh terhadap aturan-aturan syari'at yang diturunkan Allah berkenaan dengan hal dimaksud, yaitu: dilaranya membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syari'at, diwajibkannya hukuman qishas dengan hukuman yang setimpal, dilarang bunuh diri, tidak bolehnya membunuh anak karena takut miskin dan banyak lagi yang lainnya.<sup>26</sup> Semuanya itu adalah dalam rangka memelihara jiwa dan menjamin keberlangsungan hidup manusia dan hal itu berkaitan dengan *masalahah dharuriyat*.<sup>50</sup>

### 3. Memelihara atau Melindungi Akal (*Hifzh Al-'aql*)

Manusia adalah salah satu makhluk Allah SWT yang paling sempurna. Artinya, bahwa selain manusia ada makhluk lainnya di luar manusia. Walaupun demikian, ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lainnya. Akan tetapi, bentuk yang indah itu tidak ada guna kalau tidak ada hal yang kedua, yaitu akal.

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna,

---

<sup>50</sup>*Ibid.* h.18.


mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Karena itulah, akal paling penting dalam pandangan Islam. Allah orang yang berakal. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah: Qs Al-Baqarah: 164.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”.

Seandainya manusia tanpa akal, maka manusia tidak berhak mendapatkan kemuliaan yang bisa mengangkatnya menuju barisan para malaikat. Dengan akal, manusia naik menuju alam para malaikat yang luhur. Karena itulah, akal poros pembenahan pada diri manusia. Dengannya, manusia akan mendapatkan pahala dan berhak mendapat siksa. Balasan di dunia dan di akhirat berdasarkan akal dan kekuatan memin pengetahuan.

Maksud memelihara akal adalah menjaga agar akal tidak rusak, yang mengakibatkan si mukallaf tidak bermamfaat dalam masyarakat, bahkan menjadi sumber malapetaka/persoalan. Imam Syatibi memberikan contoh terhadap pemeliharaan akal dengan dilarangnya manusia meminum *khamr*. Sebab *khamr* dapat merusak akal, dan pada gilirannya dapat merusak yang lainnya, termasuk merusak agama. Dapat diyakini orang yang rusak akalnya terbuka lebar peluang untuk berbuat kejahatan dan merusak semua strata kemaslahatan yang ada, baik *dharuri*, *hajji*, *tahsini* maupun *mukammilat*.



Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju *ma'rifat* kepada Tuhan dan Penciptanya. Dengan akalnya, dia menyembah dan menaati-Nya, menetapkan kesempurnaan dan keagungan untuk-Nya, menyucikan-Nya dari segala kekurangan dan cacat, membenarkan para rasul dan para nabi, dan memercayai bahwa mereka adalah perantara yang akan memindahkan kepada manusia apa yang diperintahkan Allah, membawa kabar gembira untuk mereka dengan janji, dan membawa peringatan dengan ancaman. Maka, manusia mengoperasikan akal mereka, mempelajari yang halal dan yang haram, yang berbahaya dan bermanfaat, serta yang baik dan buruk. Berdasarkan pentingnya akal bagi kehidupan manusia, maka pemeliharaan dan perlindungan akal menjadi tujuan syar'iah yang sangat penting dalam Islam.

#### 4. Memelihara atau Melindungi Keturunan (*Hifzh al-Nasb*)

Keturuan dalam bahasa Arab, disebut dengan *nasl*, *zurriyyah*, atau *nasab* dan dapat disebut dengan *walad*. Kata *nasl*, *zurriyyah*, dan *nasab* semuanya memiliki arti keturunan. Demikian pula halnya dengan kata *walad* walaupun berarti anak, namun anak juga merupakan keturunan.<sup>51</sup> Dari semua kata atau istilah yang telah disebutkan yang banyak digunakan adalah kata/istilah *nasab*.

Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa memelihara keturunan merupakan kebutuhan asasi untuk kemaslahatan manusia.<sup>52</sup> Memelihara keturunan merupakan bentuk pemeliharaan terhadap kelestarian manusia dan membina mental generasi agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara manusia. Untuk mewujudkan maksud itu, diperlukan lembaga perkawinan yang diatur dengan baik, serta mencegah terjadinya perbuatan yang merusak diri dan keturunan, seperti zina dan sebagainya.

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang

---

<sup>51</sup> Tafsir Al-Qur'an Tematik, *Maqashidusy Syari'ah; Memahami Tujuan Utama Syari'ah*, (Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Ri, 2013), h. 118.

<sup>52</sup> Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilm Ushul al- Fiqh*, (Kuait: Dar al- Qalam, 1978), h. 205.

berlainan jenis itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam bahkan tidak hanya melarang zina saja tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.

Islam iuga memberikan jalan bagi laki-laki yang berkehendak untuk menikahi wanita lebih dari satu untuk menjaga agar dirinya tidak terjerumus ke lembah perzinahan. Sebagaimana firman Allah: Qs.Al-nisa :3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ



أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil<sup>53</sup>, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini, perlu dicatat bahwa dalam hukum Islam ini diatur lebih perinci dan pasti dibandingkan

---

<sup>53</sup>Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.<sup>54</sup>

##### 5. Memelihara atau Melindungi Harta Benda (*Hifzh al-Mal*)

Kata harta sama dengan perkataan *al-mal* dalam bahasa Arab. Kata *al-mal* sendiri dalam bahasa Arab diambil dari kata **ميل, ميل, مال** yang berarti condong, cenderung, dan miring. Dikatakan condong, cenderung, dan miring karena secara tabiat, manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta. Perkataan *al-mal* adalah *mufrad* dari bentuk jamak perkataan *al-amwal*. Ia juga bermaksud apa-apa yang dimiliki dari segala sesuatu.<sup>55</sup> Mengikut pengertian umum, maksud perkataan harta (*mal*) yang paling mudah dipahami adalah peredaran uang di antara manusia, baik dari bahan logam maupun kertas.

Harta merupakan salah satu yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Sebagai sebuah kebutuhan, maka harta menurut pandangan Islam harus dicari dan didapatkan. Karena harta merupakan sebuah kebutuhan, maka manusia juga termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antar dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang

---

<sup>54</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fikh: Akal sebagai Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 64.

<sup>55</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beiriut: t.p. , 1968), Jil. 12. H. 635-636



dikumpulkannya dengan cara yang halal, digunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan manusia lainnya.

Kedua, harta tersebut digunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang dihalalkan Allah. Oleh karena itu, harta tidak dinafkahkan untuk kefasikan atau hal-hal yang tidak berguna. Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah, dan manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian, Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusa hakannya dengan jalan apa pun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, dan gadai menggadai, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya. Perlindungan Islam terhadap harta benda seseorang tecermin dalam firman-Nya: Qs. Al-Nisa :30

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى

اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya: “Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”.

Manusia memiliki hubungan yang sangat erat dengan harta. Demikian eratnya hubungan tersebut, sehingga naluri manusia untuk memilikinya menjadi satu dengan naluri mempertahankan hidup manusia itu sendiri. Justru, harta termasuk salah satu hal penting dalam kehidupan manusia. Sebab harta termasuk unsur lima asas yang wajib dilindungi bagi setiap manusia (*al-dharuriyat al-kulliyat al-khamns*) yaitu jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan.

Adanya fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara lahiriah maupun batiniah, mendorong manusia untuk senantiasa berupaya memperoleh segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan lahiriah identik dengan terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*) berupa sandang, pangan, dan papan. Tapi manusia tidak berhenti sampai di sana, bahkan cenderung terus berkembang kebutuhan-kebutuhan lain yang ingin dipenuhi. Segala kebutuhan itu seolah-olah bisa terselesaikan dengan dikumpulkannya harta sebanyak banyaknya.

Istilah harta atau *al-mal* dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak dibatasi dalam ruang lingkup makna tertentu, sehingga *pengertian al-mal* sangat luas dan selalu berkembang. Kriteria harta menurut para ahli fikih terdiri atas: pertama, memiliki unsur nilai ekonomis; kedua, unsure manfaat atau jasa yang diperoleh dari suatu barang.

Al-Quran mempunyai pandangannya tersendiri terhadap amanah Allah SWT yang bernama harta ini dengan menerangkannya secara jelas melalui nashsh-nashshnya sebagai peringatan dan pedoman demi untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Harta menurut kacamata Islam merujuk kepada nashsh-nashsh Al-Qur'an yang menggariskan dasar-dasar pokok tentang harta yaitu bahwa pencipta dan pemilik harta.<sup>56</sup>

Di dalam kitab *Mujam al-Lughat al-Fuqaha*, harta (*mal*) adalah merujuk kepada nama bagi himpunan sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Asalnya ialah sesuatu yang menjadi cenderung kepadanya secara tabi'i dan ia boleh disimpan seperti uang dan termasuk pula apa-apa hakiki adalah Allah SWT.



#### **b. Tinjauan Pustaka**

Setelah penelitian melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Penelitian yang pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Moh. Mahmudi yang berjudul *money politik* perspektif hukum Islam dan Positif tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan *money politik* Perspektif hukum Islam dan Positif kemudian untuk mengetahui perbedaan dan persamaan *money politik* perspektif hukum Islam dan positif. Pengambilan data dilakukan dengan

---

<sup>56</sup>Jalal al-Din Abd. al-Rahman al-Suyuti, *al-Ashbah wa al-naza'ir fi qawa'id wa furu' fiqh al-shafi'iah*, (Beuriut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993), h. 327.

penelitian kepustakaan. Adapun tiga jenis pengumpulan data yaitu dari dokumentasi, observasi, interview, dan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif, dan menggunakan metode berfikir induktif.<sup>57</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memandang *money politic* sebagai perbuatan yang dilarang oleh syari'at dan perbuatan *money politic* tergolong sebagai perbuatan *risywah*, kemudian hukum positif memandang *money politic* sebagai tindakan yang melanggar undang-undang Republik Indonesia yang terkandung dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Penelitian yang kedua yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Haryono yang berjudul *risywah* (Suap-Menyuap) dan perbedaannya dengan hadiah dalam pandangan hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat membedakan antara *risywah* (suap-menyuap) dengan hadiah dalam pandangan hukum Islam. Pengambilan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Adapun tiga jenis pengumpulan data yaitu dari dokumentasi, observasi, dan interview. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif, dan menggunakan metode berfikir induktif.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Moh. Mahfudhi, *Money Politic* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, (Skripsi Progam Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2010).

<sup>58</sup> Haryono, *Risywah (Suap-menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Kajian Tematik Ayat dan Hadis Tentang *Risywah* Disampaikan Oleh Dosen Perbankan Syari'ah STAI Al-Hidayah, Bogor, 2005).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara mendasar perbedaan antara hadiah dan *risywah* ada dua sisi. Dari sisi hukum Islam yang mengharamkan *risywah* dan menghalalkan hadiah dari sisi tujuan dari *risywah* dan hadiah. Hadiah pemberian dengan tujuan ikhlas karena Allah sedangkan *risywah* pemberian dengan maksud tertentu yang tidak dibenarkan dalam Islam.

penelitian ketiga yang berhasil peneliti temukan adalah yang dilakukan oleh Harun al-Rasyid dalam skripsinya yang berjudul analisis politik uang di Indonesia dalam perspektif *maqashid al-syariah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk politik uang di Indonesia dalam pandangan atau perspektif *maqashid al-syariah* dan mengetahui strategi mencegah praktik politik uang dalam dalam Perspektif *Maqashid al-syariah* di Indonesia. Pengambilan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Adapun tiga jenis pengumpulan data yaitu dari dokumentasi, observasi, interview, dan Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif, dan menggunakan metode berfikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang dalam dalam perspektif *maqashid al-syariah* tergolong dalam bentuk suap/*rishwah*. Dalam perspektif *maqashid al-yariah* politik uang membawa kemudharatan ketimbang sebuah kemaslahatan. Kemudaratannya tentu dilandaskan pada akibat, dampak ataupun pengaruh politik uang ini bagi kehidupan pribadi, keluarga masyarakat maupun bangsa dan negara secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunah Ibnu Majah*, (Beirut Libanon: Dar Fikr, 2004), jilid 1, h. 727.
- Al-Albani, Syaikh M. Nashiruddin, *Mukhtasar Shahih Muslim: (Ringkasan) Hadits Kitab Shahih Muslim, Bab 27.22. (Hadis 1007).*
- Al-Bushrawi , al-Qurasyi , Abul Fida' Imaduddin Isma'il bin Umar Katsir (Ibnu Katsir), *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6, Sukoharjo: Insan kamil, 2015.
- Alex MA, *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*, Surabaya: Karya Harapan, 2005.
- Al-Rasyid, Harun, *Fikih Korupsi (Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syariah)*, Jakarta: Pramedia Group, 2016.
- Al-Zuhayli, Wahhab, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998, Juz II.
- An-Nawawi, Imam Al-Nawawi Muslim bi Al-Syarh, penterj. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahih Muslim, Jakarta: Mustaqim, 2002.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa bin Sauroh, *Sunan al-Tirmidzi, tahqiq al-Albani*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1997), Juz 1, h.345.
- Bakri, Asafri Jaya, *Maqashid al-Syariah Menurut al-Shathibi*, (Jakarta: Pt raja Grafindo Persada, 1996
- Basri Seta, *Pengantar Ilmu Politik*, Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011.
- Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syariah*, Bandar Lampung: Kreasi Total Media, 2018.
- Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam (Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan)*, Bandar Lampung: Total Media, 2015.
- Carlson, Matthew. "Money Politics in Japan: New Rules, Old Practices". Review by Axel Klein. *Pacific Affairs*, Vol.81, No.3 (Fall, 2008), pp. 470-471. Pacific Affairs, University Of British Columbia. <http://www.jstor.org/stable/40377748>. Accessed: 30-06-2019.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional-Balai Pustaka, 2007, edisi III, cet. ke-7.

Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia tentang Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi), dan Hadiah kepada Pejabat.

Ghofar Shidiq, "Teori *Maqashid Al-Syari'ah* Dalam Hukum Islam". *Sultan Agung*, Vol XLiv No.120 118 Juni – Agustus 2009.

Hidajat Imam, *Teori-Teori politik*, Malang: Setara press, 2009.

Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Qahiro: Darul Ma'arif, t.th, Jilid I, 3642.

Ismardi Ilyas, "*Stratifikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya*". *Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 Juni 2014.

Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Palembang: Prena Media Group, 2018.

Jazuli, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Wali, 2013.

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1991) Umam, Ahmad Khirul, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Semarang: Rasail, 2006.

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim (Kumpulan Hadits Tershahih yang Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim)*, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2016), Hadits no. 1197, h. 527.

Ni'am, M. Asrorun Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan Kesalahan Dalam Fatwa*, Jakarta: Erlangga, 2016.

Pahlevi, Muamar Riza, <http://metroballi.com>, diakses tanggal 18 November 2019.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Kamus Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008.  
1968, Jil. 12.



- Ranny Kautur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi*, Bandung : Taruna Grafika 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, UI-Press, 2007.
- Sholeh, M.Asrorun Ni'am, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa*, Jakarta: Erlangga, 2016.
- Sudirman L, "Politik Transaksional Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012.
- Sumartini, L, *Money politics dalam Pemilu*, Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004.
- Tafsir Al-Qur'an Tematik, *Maqashidusy Syari'ah; Memahami Tujuan Utama Syari'ah*, Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Ri, 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat 2, Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2016.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 47 ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 187 ayat (1).
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilm Ushul al- Fiqh*, Kuait: Dar al- Qalam, 1978.
- Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al Islamiah bi al kuwait, *al-Mausu'at al-Fiqhiah*, Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyah, t.th, Vol. 25.

Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Yubsir, *Maqashid Al-Syariah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam*, Jurnal Al Adalah, Vol 11, 2013, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 242. (on-line). Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/doi.org/10.24042/adalah.v11i2.265> (22 Februari 2020).

